

PERAN PARA PIHAK STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

The Role of Stakeholders in the Development of Non-Timber Forest Products

Tri Wibowo, Zainal Abidin, dan Trisnu Satriadi

Program Studi Magister Kehutanan

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *This study aims to determine the role of stakeholders in the development of HHBK and the mechanism of their relationship in South Kalimantan Province, especially in Tanah Laut Regency. The method in this research is through in-depth interviews based on a list of semi-structured questions to key informants in the field with the research subjects selected intentionally or purposive sampling based on the type of HHBK that are superior in Tanah Laut Regency. The results of the author's search, it can be seen that the relevant parties who support the development of superior HHBK in Tanah Laut Regency are the central government in this case the Ministry of Environment and Forestry (BPDAS Barito), the Regional Government (South Kalimantan Provincial Forestry Service and UPTD. KPH Tanah Laut), entrepreneurs or farmers. The relationship between the parties to the featured HHBK can be done by the existence of a forum that unites the perceptions of the vision and mission of the parties formed in order to support the development of HHBK. These forums are such as the South Kalimantan Non-Timber Forest Products Forum (HHBK Forum) and the Tanah Laut Honey Beekeepers and Entrepreneurs Association (Hippmatala).*

Keywords: *Non timber forest products; Stakeholders; Relations between parties*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para pihak *stakeholder* pada pengembangan HHBK dan mekanisme hubungannya di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Tanah Laut. Metode pada penelitian adalah melalui wawancara mendalam berdasarkan daftar pertanyaan semi terstruktur terhadap informan kunci di lapangan dengan subjek penelitian dipilih secara sengaja atau *purposive sampling* berdasarkan jenis HHBK yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelusuran penulis, dapat diketahui pihak-pihak terkait yang mendukung pengembangan HHBK unggulan di Kabupaten Tanah Laut adalah baik pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL Barito), Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD. KPH Tanah Laut), pengusaha ataupun petani. Hubungan antar pihak terhadap HHBK Unggulan dapat dilakukan dengan Keberadaan forum yang menyatukan persepsi visi misi para pihak dibentuk dalam rangka mendukung pengembangan HHBK Unggulan. Forum tersebut adalah seperti Forum Hasil Hutan Bukan Kayu (Forum HHBK) Kalimantan Selatan maupun Himpunan Pengusaha dan Peternak Lebah madu Tanah Laut (Hippmatala).

Kata kunci: Hasil Hutan Bukan Kayu; Stakeholder; Hubungan antar pihak

PENDAHULUAN

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu secara bertahap dialihkan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hasil hutan ini diharapkan tidak akan mempengaruhi kelestarian dan fungsi hutan secara ekologis. Pengembangan HHBK sampai saat ini belum beranjak dari orientasi bahwa HHBK merupakan hasil ikutan dari proses pembalakan, sehingga belum banyak diusahakan dalam skala perusahaan,

bahkan banyak di antaranya yang telah mulai sulit dijumpai dan masuk ke dalam Appendix II CITES. Pada umumnya jenis HHBK ditanam bersama dengan beberapa jenis pohon buah-buahan atau tanaman keras lainnya atau tumpang sari dengan tanaman pangan. Teknik pemanenan dan pengelolaan masih diusahakan secara tradisional atau secara turun temurun hingga saat ini masih terjadi. Informasi ilmu pengetahuan tentang teknik budidaya beragam jenis tanaman HHBK masih terbatas dan kurang lengkap. Sampai saat ini sebagian besar produk HHBK baru terbatas hanya kegiatan pemungutan saja dan merupakan pekerjaan sampingan masyarakat sekitar hutan (Moko, 2008).

Pemerintah telah menetapkan HHBK sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan kehutanan, namun pengembangan HHBK belum mengembirakan. Hal ini disebabkan belum banyak tersedia data dan informasi teknologi pasca panen HHBK dan informasi tentang sosial ekonomi dan kebijakan yang berkaitan dengan HHBK yang mendukung pengembangannya. Data yang tersedia pun terdapat diberbagai instansi dan bersifat parsial. Pengembangan HHBK yang belum optimal ini mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, sehingga kesejahteraannya juga menurun. Hal ini dapat mengakibatkan perambahan hutan baik dalam bentuk penebangan liar maupun bentuk lainnya yang mengakibatkan kerusakan hutan (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kemenhut, 2010).

Provinsi Kalimantan Selatan adalah provinsi yang memiliki potensi hutan dan lahan yang masih luas serta potensial untuk pengembangan hasil hutan bukan kayu. Sampai saat ini potensi hasil hutan bukan kayu belum banyak diketahui secara jelas dan dipetakan berdasarkan keberadaan potensinya. Pada tahun 2013, pemerintah melalui BPDAS Barito telah melakukan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Hasil kegiatan ini selanjutnya direalisasikan dalam bentuk surat keputusan bupati setempat tentang HHBK Unggulan untuk masing-masing kabupaten. Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan jenis-jenis HHBK Unggulan berupa Lebah Madu (prioritas I), Gaharu (prioritas II) dan Nipah (prioritas III) sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Tanah Laut No.188.45/463-KUM/2013. Surat keputusan ini secara jelas menggambarkan bahwa adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam mengembangkan HHBK Unggulan Kabupaten Tanah Laut sehingga dapat bersaing dengan produk-produk sejenis dari luar kabupaten maupun provinsi, serta menjaga kelestarian HHBK Unggulan dan produk-produk turunannya tersebut. Pada dasarnya, keberadaan komoditas unggulan pada suatu daerah akan memudahkan upaya pengembangan agribisnis. Hanya saja, persepsi dan memposisikan kriteria serta instrumen terhadap komoditas unggulan belum sama. Akibatnya, pengembangan komoditas tersebut menjadi salah urus bahkan menjadi kontra produktif

terhadap kemajuan komoditas unggulan dimaksud.

Arahan pengembangan hasil hutan bukan kayu dimaksudkan untuk memberikan arah strategi, program dan kegiatan dalam pengembangan usaha tani budidaya dan pemanfaatan komoditas hasil hutan bukan kayu. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi HHBK, berkembangnya usaha dan pemanfaatan HHBK sehingga HHBK memiliki nilai ekonomi dan daya saing tinggi, serta terciptanya kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi fisik, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan uraian di atas, maka dirasakan perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi para-pihak yang terkait dari aspek tugas, fungsi dan peran pada pengembangan HHBK dan mekanisme hubungannya di Kabupaten Tanah Laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2022 di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Metode pada penelitian adalah Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dari subjek dan informan kunci di lapangan, melalui wawancara mendalam berdasarkan daftar pertanyaan semi terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya baik berupa daftar pertanyaan bagi petani, maupun pihak-pihak terkait. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait yang telah tersedia dalam bentuk dokumen dan studi literatur yang terkait dengan hasil hutan bukan kayu. Subjek penelitian dipilih secara sengaja atau *purposive sampling* berdasarkan jenis HHBK yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Subjek penelitian terdiri atas pengurus kelompok tani Madu, Gaharu dan Nipah (masing-masing jenis HHBK diwakili oleh 2 - 3 kelompok tani, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 2 orang yang terdiri dari ketua dan sekretaris/bendahara), pegawai UPTD. KPH Tanah Laut (2 orang), BPDAS Barito selaku pembina dan penggagas penetapan HHBK Unggulan Kabupaten oleh Bupati (1 orang), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (1 orang) dan pegiat / pelaku usaha (masing-masing komoditi diwakili oleh 2 orang). Data terkait penentuan strategi diperoleh dari kegiatan

wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) dari semua parapihak yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan usaha budidaya tanaman HHBK unggulan akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh semua *stakeholder* yang berkepentingan dengan usaha tani HHBK. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, dapat diketahui pihak-pihak terkait yang mendukung pengembangan HHBK Unggulan di

Kabupaten Tanah Laut adalah baik pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDAS Barito), Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD. KPH Tanah Laut), pengusaha ataupun petani. Pada tahun 2014, telah dibentuk sebuah lembaga yang diberi nama Sentra Pengembangan Lebah madu di Kabupaten Tanah Laut, sebagai tindak lanjut dari penetapan Madu yang merupakan salah satu HHBK Unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Lembaga ini terdiri dari berbagai elemen dengan perannya masing-masing. Peran dari setiap elemen pada lembaga ini diuraikan pada Tabel 1.

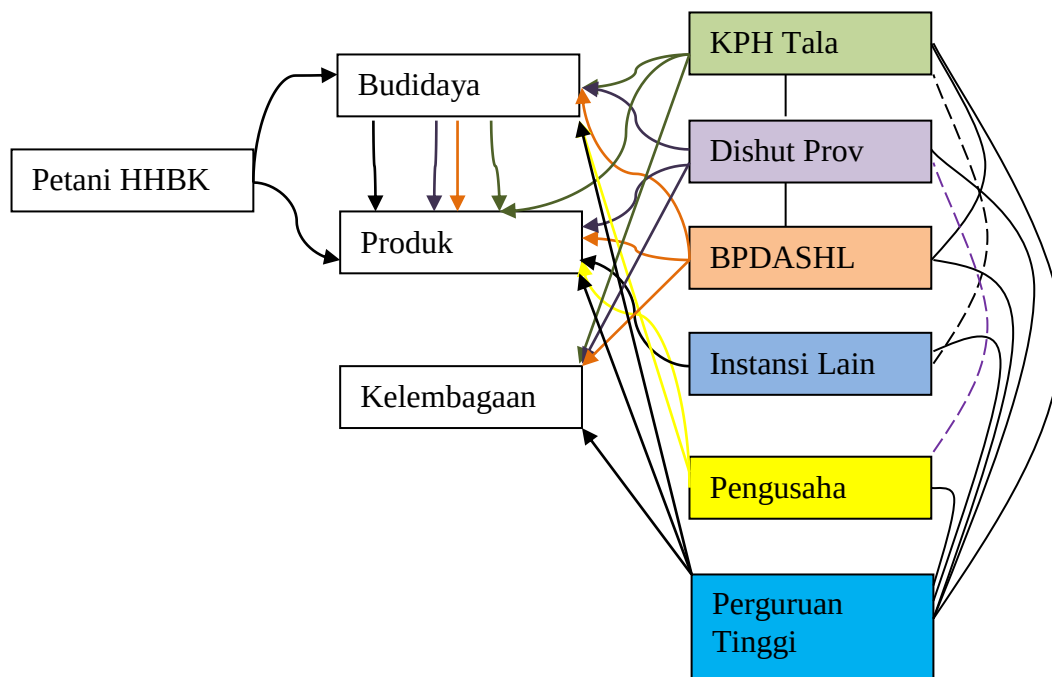
Tabel 1. Elemen Yang Tergabung Dalam Sentra Lebah Madu Beserta Perannya

No	Pihak Terkait	Peran
1.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	- Bantuan sarana produksi - Bantuan sarana pengolahan hasil - Pelatihan petani - Bantuan bibit pakan lebah
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Sekretariat Daerah	- Fasilitasi regulasi tentang pengembangan lebah madu
3.	Bappeda Kabupaten Tanah Laut	- Fasilitasi penyusunan rencana pengembangan sentra jangka pendek, menengah, dan panjang - Mendorong dan mengkoordinasikan instansi terkait (SKPD) dalam memberikan fasilitasi anggaran kepada sentra Madu dan kelompok. - Memberikan Anggaran kepada SKPD terkait kegiatan sentra Madu
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tanah Laut	- Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Kesehatan Madu. - Fasilitasi deversifikasi produk Madu - Bantuan sarana pengolahan hasil - Fasilitasi akses pemasaran hasil - Fasilitasi pembentukan Asosiasi/koperasi petani
5.	UPTD. KPH Tanah Laut	- Fasilitasi kesekretariatan sentra - Bantuan sarana produksi - Bantuan sarana pengolahan hasil - Pelatihan petani dan studi banding - Fasilitasi perluasan areal tanaman pakan lebah madu di dalam kawasan maupun di lokasi hutan rakyat. - Memberikan pendampingan kepada kelompok tani lebah madu - Pelatihan petani pengembangan ternak lebah madu - Studi banding/Magang
6.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Tanah Laut	- Fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan kelompok tani

No	Pihak Terkait	Peran
7.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut	- Fasilitasi perluasan areal pengembangan tanaman pakan Madu di luar kawasan hutan.
8.	Perguruan Tinggi - Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat - Politeknik Tanah Laut	- Memberikan Fasilitasi penyiapan informasi terkait pengembangan lebah madu. - Penelitian dan pengembangan lebah madu baik teknik pengelolaan ternak lebah madu, pengolahan hasil dan pemasaran hasil serta produk dan turunannya. - Pembinaan kelembagaan kelompok
9.	Balai Penelitian Kehutanan	- Bantuan penyiapan informasi terkait ternak lebah madu. - Penelitian dan pengembangan lebah madu baik teknik pengelolaan ternak lebah madu, pengolahan hasil dan pemasaran hasil. - Pembinaan kelembagaan kelompok
10.	Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Barito	- Fasilitasi kesekretariatan sentra - Fasilitasi pertemuan kelompok - Pendampingan kelompok - Pembuatan model budidaya tanaman pakan lebah. - Pelatihan petani, studi banding (kelembagaan, teknis) - Fasilitasi akses permodalan melalui BLU
11.	Dekranasda Kabupaten Tanah Laut	- Fasilitasi akses pemasaran hasil - Fasilitasi pembentukan Asosiasi/koperasi petani
12.	Dinas Kesehatan	- Fasilitasi Sertikasi produk (IRT produk) - Fasilitasi pembinaan kelompok
13.	Perusahaan Pertambangan	- Bantuan sarana produksi - Bantuan sarana pengolahan hasil - Pelatihan budidaya/ternak lebah madu - Fasilitasi perluasan areal pengembangan tanaman pakan lebah madu. - Fasilitasi perluasan dan pengembangan budidaya lebah madu.
14.	Kelompok tani	- Mempunyai keinginan yang kuat, serius, tekun dan semangat dalam pengembangan lebah madu - Menyiapkan lahan untuk penanaman pakan dan penempatan stup baik pekarangan maupun kebun.

Upaya Hubungan antar pihak dalam pengembangan Madu memerlukan dukungan para pihak yang terkait satu sama lain, seperti Keberadaan forum yang menyatukan persepsi visi misi para pihak dibentuk dalam rangka mendukung pengembangan HHBK Unggulan. Forum tersebut adalah seperti Forum Hasil Hutan Bukan Kayu (Forum HHBK) Kalimantan Selatan maupun Himpunan Pengusaha dan Peternak Lebah madu Tanah Laut (Hippmatala). Dengan adanya forum ini,

garis putus antara para pihak dapat diminimalisir. Pengembangan HHBK menjadi lebih terarah dan jelas. Keanggotaan Forum yang meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi/LSM mampu mendorong pengembangan HHBK secara terpadu dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pihak secara adil berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Hubungan antar pihak terhadap HHBK Unggulan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hubungan Para Pihak Pengembangan HHBK Unggulan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dapat dikemukakan simpulan bahwa peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan HHBK Unggulan Kabupaten Tanah Laut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDAS Barito), Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut), pengusaha dan petani lebah madu.

Saran

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dilapangan, Pengembangan HHBK Unggulan di Kabupaten Tanah Laut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan strategi dan perlunya menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan POKJA pengelolaan HHBK yang didalamnya memuat peran dan tugas masing-masing *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kemenhut, 2010. Rencana Penelitian Integratif (RPI) Tahun 2010 - 2014 Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kemenhut, Jakarta
- BPS (Badan Pusat Statistika) Kabupaten Tanah Laut. 2021. *Kabupaten Tanah Laut dalam Angka Tahun 2013*. BPS (Badan Pusat Statistika) Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari
- BSN (Badan Standardisasi Nasional), 2004. *Madu*. SNI 01-3545-2004. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta
- Moko, H., 2008. Menggalakan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Produk Unggulan Informasi Teknis Vol. 6 No. 2, September 2008
- Nuryati, S. 2006. *Status dan Potensi Pasar Madu Organik Nasional dan Internasional*. Aliansi Organik Indonesia, Bogor

Widiarti, A. dan Kuntadi, 2012. *Budidaya Lebah Madu Apis mellifera L. oleh Masyarakat Pedesaan Kabupaten Pati, Jawa Tengah*. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Vol. 9 No. 4: 351-36

Yusanto, M., I. dan Widjajakusuma, M., K. 2003. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*. Khairul Bayan. Jakarta